



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 16 November 2016

Halaman: 4

Rp 10 Triliun untuk Penanganan Kawasan Kumuh

YOGYA (MERAPI) - Penanganan kawasan kumuh akan dilakukan dengan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Pemerintah pusat siap menggelontorkan dana sebesar Rp 10 triliun untuk menangani kawasan kumuh itu. Termasuk untuk menangani kawasan kumuh di Kota Yogyakarta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeliono mengatakan program IBM yang dilakukan PUPR cukup banyak seperti Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program IBM mengklaim cukup efektif dengan menggerakkan tenaga swadaya masyarakat. Begitu pula rasa kepemilikan warga terhadap penataan infrastruktur kawasan kumuh.

"Jadi kita menggerakkan masyarakat. Ini (Karangwaru Riverside) salah satu contoh saja. Di samping menyerap tenaga kerja dengan padat karya, rasa pemeliharaan warga juga lebih tinggi," kata Basoeki usai kunjungan Program Kotaku di bantaran Sungai Buntung, Karangwaru, Tegalrejo, Selasa (15/11).

Selain di Yogyakarta, Program Kotaku juga dilakukan di 40 kabupaten/kota di Indonesia. Menurutnya kawasan kumuh tepi sungai di Karangwaru yang telah ditata masyarakat berpotensi menjadi tempat wisata. Namun hal itu harus dikemas misalnya dengan cerita sejarah setempat. "Bisa dengan cerita sejarah agar

menarik dan jadi edukasi ke anak-anak," ujarnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo menambahkan, penuntasan kawasan kumuh secara nasional ditargetkan sebanyak 23.000 hektare lebih selama 5 tahun. Dia merinci dari jumlah itu yang masuk kawasan kumuh benar hanya 2.500 hektare dan sisanya adalah kumuh ringan atau bersifat pencegahan. Pemerintah pusat telah menyiapkan dana sekitar Rp 10 triliun untuk penanganan kawasan kumuh di 269 kabupaten/kota.

"Pemerintah provinsi kabupaten, kota dan masyarakat akan digerakkan dari dana Rp 10 triliun itu. Alokasinya tergantung dari perencanaan masing-masing kabupaten kota. Penanganan kawasan kumuh ini kan bikin rencana induk dulu," papar Sri Hartoyo.

Dalam kunjungannya kemarin, Menteri PUPR didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek serta Menteri Desa Kementerian

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Eko menjanjikan alokasi dana sekitar Rp 500 juta untuk pengembangan Karangwaru Riverside.

Sementara itu Penggiat Karangwaru Riverside, Subandono mengatakan pembangunan di bantaran Sungai Buntung di Karangwaru itu sejak dari perencanaan atas keinginan masyarakat. Penataan di Karangwaru merupakan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dengan dana dari pusat.

"Penataan ada enam segmen, baru tiga segmen yang

selesai seratus persen. Awalnya sebelum penataan, rumah warga terendam air, sekarang tidak, kecuali hujan besar. Yang belum yang di sisi selatan," terang Subandono.

Sedangkan Kepala Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Hendra Tantular mengatakan ada 10 kelurahan di Yogyakarta yang mendapatkan pendampingan pusat melalui program Kotaku. Penanganan kawasan kumuh juga dilakukan dengan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Total ada 3.304

RTLH. Tahun 2017 dari 500 unit diseleksi, hanya 197 RTLH yang lolos.

Sementara itu, Kabupaten Bantul menjadi tempat penanaman Gerakan Nasional Masyarakat Hidup Sehat (Germas) untuk pertama kalinya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani secara resmi mencanangkan gerakan ini di Lapangan Tamanan, Banguntapan, Bantul. Dalam penanaman kemarin, Puan yakin gerakan yang didukung oleh 20 kementerian ini mampu merubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat.

(Tri/C-1)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Permukiman dan Prasarana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005